

BPK Pusat Dukung Bentuk Pansus Asset

PONTIANAK. Ketua DPRD Kalbar, Minsen sempat menyatakan belum memprioritaskan pembentukan Pansus asset. Pernyataan ini terbantahkan melalui lontaran tegas anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DR H Rizal Djalil dalam rapat paripurna istimewa penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap APBD Kalbar 2011, Kamis (21/7) di ruang Balairungsari DPRD Kalbar.

Dalam pidato singkatnya, Rizal Djalil mengharapkan anggota DPRD Kalbar membentuk Panja atau Pansus (Panitia Kerja/Panitia Khusus) aset. Menurutnya hal ini untuk mengamankan asset milik daerah dan penilaian BPK terhadap APBD Kalbar setiap tahunnya bisa Wajar Tanpa Pengecualian bukan Wajar Dengan Pengecualian seperti sekarang ini, hanya dikarenakan asset yang belum diinventarisir dengan baik.

"Yang jelas masalah asset dan administrasinya adalah urusan Sekda Kalbar, termasuk mengkoordinir biro asset, sementara tugas Gubernur Kalbar adalah pada tataran kebijakan, tidak masuk keurusan teknis," tegas Rizal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menjelaskan, rencana anggota DPRD Kalbar untuk membentuk pansus memang sudah lama, sebelum masalah tanah KONI 6,4 hektar muncul ke permukaan, namun rencana tersebut terkesan dihalangi Ketua DPRD Kalbar, Minsen dan Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Ini terbukti sampai tiga kali DPRD Kalbar mengirim surat kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, tidak juga ditanggapi hanya untuk dapat segera memberikan data dokumen kepada DPRD Kalbar berupa dokumen dasar penguasaan asset tanah yang disengketakan. Dokumen perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi

Kalbar dengan PT Citra Putra Mandiri (mulai MoU pertama tahun 2005 sampai terakhir)," katanya.

Bahkan, legislator Partai Golkar ini juga menyayangkan pernyataan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis di media bahwa sampai 100 kali pun surat DPRD Kalbar tidak akan dibalas kalau belum selesai.

"DPRD Kalbar mengirim surat kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita hanya mau tahu isi perjanjian tersebut apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ini terkesan ditutup-tutupi sampai-sampai DPRD Kalbar mengeluarkan surat ke tiga, dokumen yang dipintakan belum juga diberikan," papar Prabasa.

Dia menegaskan, yang jelas Sekda Kalbar harus menjelaskan kepada DPRD Kalbar apakah ada dasar kebijakan Gubernur Kalbar untuk melepaskan aset KONI tersebut. "Apapun jawaban eksekutif akan kita laoprkan kepada Mendagri, kalau ada unsur pidana maka silakan aparat

terkait melakukan proses penyelidikan mengenai asset KONI," tegas Prabasa.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kalbar, Minsen, SH, mengetakan rencana Pansus Asset belum menjadi prioritas, karena yang menjadi objek asset itu tidak jelas asset yang mana yang akan dipansuskan. "Tidak ada niat saya untuk menahan atau menghalang-halangi pembentukan pasus asset apabila dikehendaki anggota, yang penting aturan tetap dijalankan," tegasnya.

Menurut mantan Ketua DPRD Landak ini, data seluruh asset telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, kepada pimpinan DPRD Kalbar, dan lembaranya sangat tebal, kalau di foto copy butuh puluhan juta, apabila dibagikan kepada 55 anggota DPRD Kalbar. "Makanya bagi anggota DPRD Kalbar yang butuh informasi mengenai asset silakan di foto copy sendiri dan copynya ada dimeja saya," tuntas Minsen. (jul)